

LMCK

(LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA)



TRIWULAN I | 2025

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III BENGKULU
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI



ditjen_hubdat



hubdat151



Ditjen Perhubungan Darat



hubdat.dephub.go.id



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI



• KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III BENGKULU

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu mengemban amanah menjadi organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat, melalui suatu layanan transportasi darat.

Sebagai institusi publik, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut dan realisasi anggaran.

Penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun isi dari laporan ini mencakup Rencana Strategis Tahun 2025 – 2030, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Pengukuran Kinerja Tahun 2025 serta tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja Tahun 2025.

Kami Berharap Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I ini dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada Tahun – Tahun mendatang.

Bengkulu, 9 April 2025

Kepala BPTD Kelas III Bengkulu



TAUFIK ERFIN, A.Md LLASD., SE., ST., MM
NIP. 19830822 200912 1 003



Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu Tahun 2025

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu Tahun 2025

No	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Dikonsep	Elena Oktaviani, A.Md.Tra	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi	9/4/2025	
2	Dikonsep	Raden Ayu Anggita Maharani, A.Md.Tra	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi	9/4/2025	
3	Dikonsep	Mayo Treevansyah, A.Md.Tra	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi	9/4/2025	
4	Dikonsep	Yudra Damai Kusuma, A.Md.Tra	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi	9/4/2025	
5	Diperiksa	Nolita Oktavia, SS	Ketua Tim Tata Usaha	9/4/2025	
6	Diperiksa	Edi Sunyoto, A.Md	Ketua Tim Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan	9/4/2025	
7	Diperiksa	Ronald, SE	Ketua Tim Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	9/4/2025	
8	Diperiksa	Arpan Pandjaitan, S.T	Ketua Tim Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	9/4/2025	
9	Disetujui	Taufik Erfin, A.Md LLASD., SE., ST., MM	Kepala BPTD Kelas III Bengkulu	9/4/2025	



• RINGKASAN EKSEKUTIF

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK) Triwulan I Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu Tahun 2025 merupakan tolak ukur instansi pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan di triwulan pertama tahun 2025 yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, bersih, dan bertanggung jawab.

Pada Tahun 2025, ditetapkan 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) dan 11 (Sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Adapun rincian capaian untuk setiap IKK pada triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan terealisasi sebesar 0 (target 100%) tercapai 0%;
2. Jumlah terminal tipe A dan terminal barang yang beroperasi terealisasi sebesar 2 Lokasi (target 2 Lokasi) tercapai 100%;
3. Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan terealisasi sebesar 25 (target 100%) tercapai 25%;
4. Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi terealisasi sebesar 2 Lokasi (target 2 lokasi) tercapai 100%;
5. Persentase pelaksanaan standar pelayanan minimum (SPM) di Terminal Tipe A terealisasi sebesar 13,75 (target 55%) tercapai 25%
6. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP terealisasi sebesar 22 (target 88%) tercapai 25%;
7. Persentase perlengkapan jalan yang terpasang terealisasi sebesar 5 (target 20%) tercapai 25%;
8. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan terealisasi sebesar 0 orang (target 2000) tercapai 0%;

- 9.** Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor terealisasi sebesar 18,7 (target 74,8%) tercapai 25%;
- 10.** Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terealisasi sebesar 81 (Target 81) tercapai 100%;
- 11.** Tingkat penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebesar 84 (target 84) tercapai 100%.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan, program, sasaran, indikator kinerja utama dan kegiatan yang dilaksanakan sudah terlaksana dengan baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi dan misi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu sebagai mana yang telah dirumuskan dalam rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu Tahun 2025 – 2029.

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu terus berkomitmen untuk Melakukan perbaikan manajemen, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja guna meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan publik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	2
I.1. Latar Belakang.....	2
I.2. Tugas Pokok dan Fungsi	2
I.3. Sumber Daya Manusia	6
I.4. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan	7
I.5. Sistematika Laporan	9
I.6. Uraian Singkat Perencanaan Strategis	14
I.7 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	16
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA	19
II.1. Tahapan Pengukuran Kinerja	19
II.2. Pengukuran Capaian Kinerja	19
BAB III PENUTUP	65
III.1 Ringkasan Capaian	65
III.2. Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab.....	67
LAMPIRAN.....	71



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu dituntut untuk menyelenggarakan Sistem Pemerintahan dengan Prudent, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien sesuai dengan prinsip – prinsip Good Governance sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga itu diperlukan Akuntabilitas Publik sebagai landasan bagi proses penyelenggaraannya.

I.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Balai LLAJSDP, KSOPP, Pelabuhan Penyeberangan dilebur dan disempurnakan nomenklaturmya menjadi 33 UPT Balai Pengelola Transportasi Darat dengan Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

1. Tugas

Balai Pengelola Transportasi Darat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan terminal Tipe A, terminal barang untuk umum, unit pelaksanaan penimbangan kendaraan bermotor, dan Pelabuhan sungai, danau, penyeberangan, pengendalian dan pengawasan keselamatan sarana, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dala pasal 2, BPTD menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan terminal Tipe A, terminal barang untuk umum, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, dan Pelabuhan sungai, danau, penyeberangan;

- c. Pelaksanaan pengendalian keselamatan sarana dan angkutan jalan, keselamatan dan keamanan pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan, serta melaksanakan kegiatan keperintisan;
- d. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengendalian lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
- e. Pelaksanaan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya manusia, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

3. Tipologi (BPTD) terdiri atas :

- a. BPTD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan terminal tipe A, terminal barang untuk umum, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, dan Pelabuhan sungai, danau, penyeberangan, pengendalian, dan pengawasan keselamatan sarana, prasarana, lalu lintas dan angkutan jalan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran angkutan sungai, danau, dan penyeberangan disebut BPTD Kelas I;
- b. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik daratan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta Pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan perintis, yang selanjutnya disebut BPTD Kelas II;
- c. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik kepulauan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta Pelabuhan sungai danau, dan penyeberangan komersial dan perintis, yang selanjutnya disebut BPTD Kelas III.

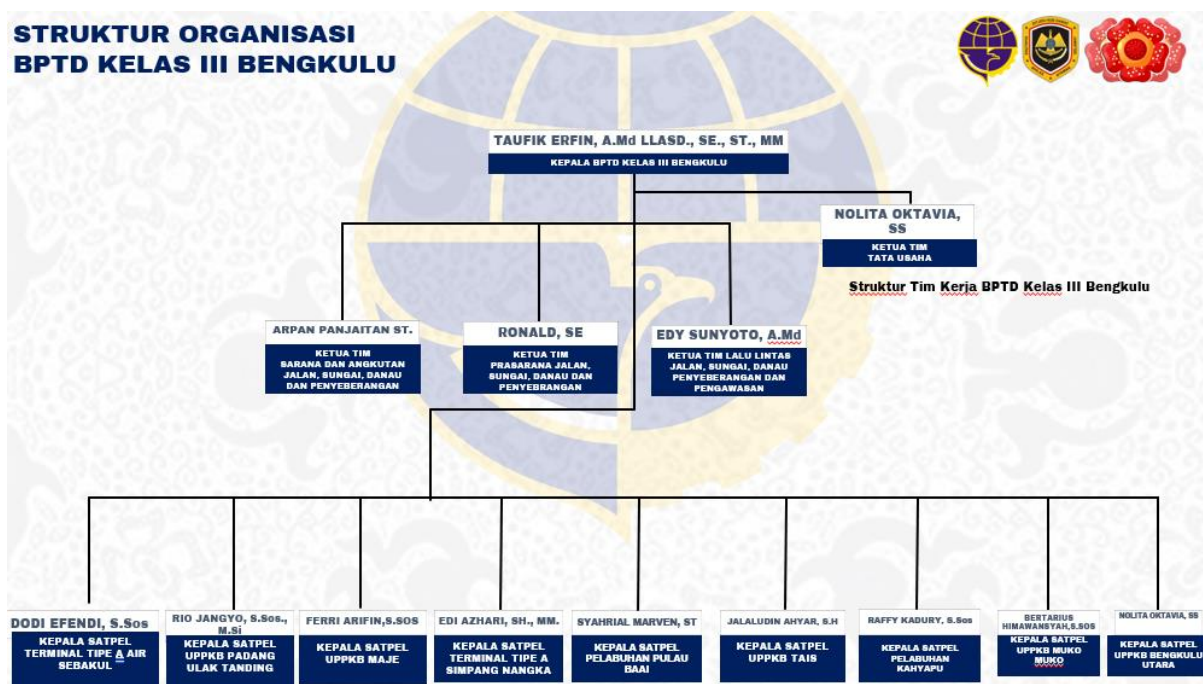
4. Susunan Organisasi BPTD Kelas I terdiri atas :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bagian Prasarana;
- c. Bagian Sarana dan Angkutan;
- d. Bidang Lalu Lintas dan Pengawasan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

5. Susunan Organisasi BPTD Kelas II terdiri atas :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
 - c. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
 - d. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Susunan Organisasi BPTD Kelas III terdiri atas :
- a. Kelompok Jabatan Fungsional.

I.2.1. Bagan Struktur Organisasi



Gambar I. 1 Struktur Organisasi BPTD Kelas III Bengkulu

Tugas dan tanggung jawab masing – masing seksi, sub bagian dan kelompok jabatan adalah sebagai berikut :

1. Subbagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha Mempunyai Tugas Melakukan penyusunan bahan rencana, program, dan anggaran, urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat, serta evaluasi dan pelaporan. tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan evaluasi kinerja, pengelolaan urusan keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta pelaporan Sistem Akuntansi Instansi, urusan sumber daya manusia, hukum,

hubungan masyarakat, persuratan, kearsipan dan dokumentasi, pelayanan informasi publik, perlengkapan, rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.

2. Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan mempunyai melaksanakan pembangunan, pengembangan, pelayanan jasa, dan pengoperasian terminal tipe A, terminal barang untuk umum, dan unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, serta bantuan teknis fasilitas pendukung dan integrasi moda dan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan.

3. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan kalibrasi peralatan pengujian berkala dan pemeriksaan kesesuaian fisik rancang bangun kendaraan bermotor, pemeriksaan dan sertifikasi kelaiklautan kapal, analisis trayek angkutan jalan antar kota antar provinsi dan angkutan jalan yang disubsidi oleh pemerintah pusat, penetapan jadwal operasi, pemberian subsidi angkutan jalan dan pelayaran perintis sungai, danau, dan penyeberangan, serta bantuan teknis penyediaan sarana jalan, sungai, danau, dan penyeberangan.

4. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan

Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan untuk jaringan jalan nasional, penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan perlengkapan jalan, rambu sungai dan danau, sarana bantu navigasi pelayaran, dan sistem informasi manajemen lalu lintas sungai, danau, dan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi di kolam pelabuhan penyeberangan dan alur sungai dan danau, pemberian rekomendasi laik fungsi jalan nasional non-tol, pemberian bantuan teknis perlengkapan jalan, halte, dan rambu sungai danau, pengamatan dan pemantauan perusahaan angkutan jalan, kegiatan karoseri, penyelenggara pengujian berkala kendaraan bermotor, pelabuhan dan penyelenggara pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersil, operator kapal sungai, danau, dan penyeberangan, kendaraan bermotor di jalan, tarif angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, pemberian subsidi angkutan jalan, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pemenuhan perlengkapan jalan, persetujuan teknis analisis dampak lalu lintas, pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan,

pemenuhan kelaiklautan kapal sungai, danau, dan penyeberangan, ketepatan waktu pelayanan, dan pemberian subsidi angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, sarana bantu navigasi pelayanan sungai, danau, dan penyeberangan, rambu, alur, dan halte sungai danau, kegiatan pengerukan dan reklamasi di kolam pelabuhan penyeberangan dan alur sungai danau, dan pemanfaatan bantuan teknis, pelaksanaan kegiatan kesyahbandaran pada pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, serta patroli dan pengamanan pelayanan sungai, danau, dan penyeberangan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I.3. Sumber Daya Manusia

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu menaungi sebanyak 145 Pegawai dengan rincian sebagai berikut :

Tabel I. 1 Rekapitulasi Jumlah Pegawai BPTD Kelas III Bengkulu Tahun 2025

NO.	KETERANGAN	ASN	PPNPN	TOTAL
1	KANTOR INDUK	55	8	63
2	UPPKB PADANG ULAK TANDING	22	7	29
3	SATPEL PELABUHAN PULAU BAAI	8	2	10
4	TERMINAL AIR SEBAKUL	13	0	13
5	TERMINAL SIMPANG NANGKA	9	7	16
6	UPPKB TAIS	1	2	3
7	SATPEL PELABUHAN KAHYAPU	6	2	8

NO.	KETERANGAN	ASN	PPNPN	TOTAL
8	SATPEL UPPKB MUKO - MUKO	1	0	1
9	SATPEL UPPKB MAJE	1	0	1
10	SATPEL UPPKB BENGKULU UTARA	1	0	1
TOTAL		145		

I.4. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu memetakan potensi, Isu Strategis dan Permasalahan yang akan dihadapi.

I.4.1. Potensi

1. Wilayah kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu yang meliputi Seluruh Provinsi Bengkulu yang terdiri dari 10 (Sepuluh) Kabupaten/Kota;
2. Dengan adanya sebagian pelimpahan kewenangan pusat ke Balai yang memotong jarak dan waktu birokrasi tentunya akan memungkinkan meningkatnya peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan dana investasi yang dibutuhkan bagi pembangunan infrastruktur transportasi darat. Meningkatnya peran serta swasta dan masyarakat dalam pengembangan pelayanan transportasi darat akan memperluas jangkauan pelayanan dengan kualitas pelayanan yang makin baik;
3. Adanya penambahan sumber daya manusia pada tahun 2024, yang ditempatkan tersebar di satuan pelayanan maupun tim teknis dan tim tata usaha;
4. Perkembangan teknologi baik peralatan dan informasi beserta personil yang memiliki kemampuan menggunakan teknologi tersebut yang memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan mulai tahap perencanaan, pembangunan serta pemeliharaan;

5. Kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah yang dalam hal ini adalah Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu dan Dinas Perhubungan se-Provinsi Bengkulu.

I.4.2. Kewenangan

- a. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
 - 1) yang masih harus diselesaikan di tahun-tahun mendatang Terkait prasarana merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan;
 - 2) Terkait jalan merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (sekarang bernama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat);
 - 3) Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009. Berbagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009 telah dapat diselesaikan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Namun demikian masih terdapat Petunjuk Teknis.
- b. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - 1) Pembagian urusan pemerintahan Bidang Perhubungan, untuk Pemerintah Pusat yaitu Penyelenggaraan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dan Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen);
 - 2) Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Pembangunan Prasarana Sub Sektor Perhubungan Darat, seperti ketersediaan/ pembebasan lahan untuk jalan akses.
- c. PM No. 122 Tahun 2018
 - 1) Yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan dalam Transportasi Penyeberangan adalah sebagai berikut:
 - 2) Keselamatan dan Keamanan Pelayaran TSDP;
 - 3) Keselamatan dan Keamanan Angkutan di Perairan, Pelabuhan, Perlindungan Lingkungan Maritim.

I.4.3. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, perlu didukung oleh penambahan jumlah dan peningkatan kompetensi pegawai dalam

rangka pelaksanaan tupoksi dikarenakan kurang atau terbatasnya SDM yang berkompeten.

I.4.4. Anggaran

Terdapat perbedaan antara pagu kebutuhan usulan dengan alokasi anggaran, sementara tugas yang diamanahkan begitu besar sehingga BPTD hanya dapat memenuhi sebagian kebutuhan terhadap prasarana dan sarana perhubungan darat.

I.4.5. Isu Strategis

1. Pengoperasian Jembatan Timbang (UPPKB);
2. Pengoperasian Terminal Penumpang;
3. Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Angkutan Penyeberangan;
4. Penataan dan Pembinaan SDM Transportasi Darat.
5. Perubahan Mindset dan Cultureset Masyarakat, Operator terkait prioritas angkutan jalan dan angkutan umum;
6. ODOL (Over Dimension Over Loading)

I.5. Sistematika Laporan

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Tugas Pokok dan Fungsi
- I.3. Sumber Daya Manusia
- I.4. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan
- I.5. Sistematika Laporan
- I.6. Uraian Singkat Perencanaan Strategis
 - I.6.1. Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025
- I.7. Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

- II.1. Tahapan Pengukuran Kinerja
- II.2 Pengukuran Capaian Kinerja
 - II.2.1 SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi**

- Uraian Sasaran Program

1. IKK1.1 Presentase pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan

- a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

2. IKK1.3 Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi

- a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

3. IKK1.5 Presentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyebrangan

- a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

4. IKK1.6 Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi

- a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.2 SK2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat

- Uraian Sasaran Program

1. IKK2.1 Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

di Terminal Tipe-A

- a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

2. IKK2.3 Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP

- a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.3 SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

- Uraian Sasaran Program

1. IKK3.1 Presentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal

- a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

2. IKK3.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

- a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

3. IKK7a Presentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan

Bermotor

- a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.4 SK5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

- Uraian Sasaran Program

1. IKK5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

- a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.5 SK6 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Pehubungan Darat Akuntabel

- Uraian Sasaran Program

1. IKK6.1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran DITJEN Perhubungan Darat Akuntabel

- a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.3 Realisasi Anggaran

II.3.1. Alokasi Anggaran Tahun 2025

- 1. Pagu Anggaran
 - a. Rincian Per Sumber Dana Tahun 2025
 - b. Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2025

- c. Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran
 - 2. Refocusing Anggaran Tahun 2025
 - a. Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2025
 - b. Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2025
 - c. Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2025
 - d. Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025
 - 3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2025 – 2029
- II.3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2025
- 1. Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025
 - 2. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025
 - 3. Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025
 - 4. Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja
- II.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- 1. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan
 - 2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia (tabel perbandingan jumlah kebutuhan dan jumlah eksisting SDM)
 - 3. Hambatan dan Kendala

BAB III PENUTUP

III.1 Penutup

III.1.1 Ringkasan Capaian

III.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Lampiran

- 1. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025;
- 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
- 3. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
- 4. Rencana Aksi Tahun 2025;
- 5. Revisi Rencana Aksi Tahun 2025
- 6. Monitoring Rencana Aksi Tahun 2025;
- 7. Lain – lain yang dianggap perlu.

I.6. Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat yang mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2025 – 2029 merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program Ditjen Perhubungan Darat dalam kurun waktu 2025-2029 sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan 2025-2029 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan perhubungan.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi, Balai Pengelola Transportasi Darat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, mempunyai tugas menyelenggarakan serta pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.

Guna mencapai sasaran, maka sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja utama Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Bengkulu sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Bengkulu Tahun 2025.

I.6.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025

Tabel I.2 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
1	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
			IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2
			IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan	%	100

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
				keperintisan angkutan penyeberangan		
			IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	2
2	SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan standar pelayanan minimum (SPM) di terminal tipe A	%	55
			IKK2.3	Persentase pelaksanaan standar pelayanan minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	88
3	SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	20
			IKK3.5	Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	2000
			IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	74,8
4	SK5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan teknis transportasi darat	Nilai	81
5	SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen	IKK6.1	Tingkat penyelenggaraan	Nilai	84

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
		Perhubungan Darat Akuntabel		perkantoran Ditjen Perhubungan Darat		

I.7 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu merupakan kontrak kinerja antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan harus dilaksanakan dalam kurun waktu berjalan.

Indikator Kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat adalah sebagai berikut :

Tabel I.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
1	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
			IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2
			IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
			IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	2
2	SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan standar pelayanan minimum (SPM) di terminal tipe A	%	55
			IKK2.3	Persentase pelaksanaan standar pelayanan	%	88

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
				minimum (SPM) di pelabuhan SDP		
3	SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	20
			IKK3.5	Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	2000
			IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	74,8
4	SK5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan teknis transportasi darat	Nilai	81
5	SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK6.1	Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	84



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

II.1. Tahapan Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah pencapaian kinerja suatu Instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya - upaya Strategis dan Operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan Visi dan Misinya.

II.2. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja. Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web e - Performance yang menyediakan fasilitas Inputting, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan unit kerja Eselon I, II, III dan IV mandiri di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan alamat <https://www.epformance.dephub.go.id> dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal.

Guna memudahkan penggunaan sistem aplikasi tersebut, terus dilakukan upaya penyempurnaan atas sistem aplikasi tersebut agar para operator pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat lebih mudah menggunakan sistem aplikasi, di samping itu diupayakan pula bagi setiap operator yang bertugas menjalankan/melaksanakan sistem aplikasi dapat diberikan reward atas hasil kerjanya dan penilaian unit kerja masing-masing.

Melalui penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan evaluasi rutin atas capaian kinerja secara periodik tiap bulannya, di mana hal ini menjadi salah satu materi yang direkomendasikan Tim Evaluator SAKIP dari Kementerian PAN dan RB, dimana dapat meningkatkan nilai capaian hasil evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dimasa mendatang.

a) Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Persentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja Persentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Program adalah sebagai berikut :

b) Persentase Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan Persentase capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \text{Realisasi Target} \times 100 \%$$

- b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$

c) Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Bengkulu Tahun 2025

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi:

1. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta alternatif solusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025;

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2025 Dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029.

Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Provinsi Bengkulu, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja. Untuk mewujudkan 3 (tiga) tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Draft Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029, bermuara pada terwujudnya 6 (Enam) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai pada periode 2025-2029.

Tabel II. 1 Pengukuran Kinerja Balai Transportasi Darat Kelas III Bengkulu Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2025	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
				T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
SK1	Meningkatkan konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi					75%									
IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	25	0	0%									
IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2	2	2	100%									
IKK1.5	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	%	100	25	25	100%									
IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	2	2	2	100%									
SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat					100%									
IKK2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A	%	55	13,75	13,75	100%									
IKK2.3	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	%	88	22	22	100%									
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat					66,66%									
IKK3.1	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	20	5	5	100%									
IKK3.5	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	2000	0	0	0%									

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2025	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
				T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	74,8	18,7	18,7	100%									
SK5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat					100%									
IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	81	81	81	100%									
SK6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat					100%									
IKK6.1	Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	84	84	84	100%									
RATA – RATA PERSENTASE CAPAIAN SASARAN PROGRAM						70%									
RATA – RATA PERSENTASE CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM						30%									
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% (IKK≥100%)															
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% (0%≤IKK<100%)															

II.2.1 SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas III Provinsi Bengkulu merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Draft Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2025-2029. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam IKP membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas dan peningkatan angkutan perkotaan.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 diukur melalui 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

IKK 1.1 Presentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan

IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi

IKK 1.5 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan
Penyeberangan

IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi

1. IKK 1.1 Presentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan merupakan perbandingan Jumlah Trayek perintis yang dilayani terhadap Jumlah trayek

angkutan perintis yang telah ditetapkan. Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk menghubungkan wilayah terisolir, belum berkembang atau wilayah perbatasan dengan kawasan perkotaan yang belum ada pelayanan angkutan umum dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Lalu wilayah perbatasan dan/atau wilayah lainnya yang karena pertimbangan aspek sosial politik harus dilayani, juga transportasi yang melayani daerah-daerah potensial (daerah transmigrasi) dengan kawasan perkotaan.

Untuk menghitung realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKK1.1 = \frac{\text{Jumlah RIT realisasi pada tahun } (n)}{\text{Jumlah RIT yang direncanakan}} \times 100\%$$

Keterangan : RIT adalah satu kali perjalanan dari tempat asal ke tempat tujuan atau sebaliknya.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan tahun 2025 sebesar 100%, jika dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja tahun 2025 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik Capaian IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan.

a.3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

1) Dasar Hukum

- UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- PM Perhubungan No. 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
- PM 73 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Jalan Perintis;
- Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 8317 Tahun 2023 tanggal 27 Oktober 2023 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2024.

Penetapan jaringan trayek angkutan jalan perintis ditetapkan dalam rangka menjamin tersedianya angkutan umum pada wilayah tertentu berupa wilayah terisolir dan/atau belum berkembang dengan kawasan perkotaan yang belum dilayani oleh angkutan umum. Dengan adanya penetapan ini dapat diberikan subsidi pengoperasian angkutan jalan perintis berdasarkan perhitungan subsidi pengoperasian angkutan jalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

2) Target dan Revisi Target

Didalam Perjanjian kinerja Tahun 2025, IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan memiliki target kinerja sebesar 100%.

3) Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- Telah berkontraknya kegiatan Subsidi Operasional Angkutan Jalan pada tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- Melakukan penambahan ritase di hari lain, apabila dalam 1 (satu) hari belum terpenuhi target ritase.
- Melakukan penertiban angkutan plat hitam bersama dengan Dinas Perhubungan setempat.

4) Faktor Kegagalan dan Potensi Kegagalan

Faktor kegagalan dan potensi kegagalan yang harus diantisipasi dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- Makin menurunnya animo masyarakat dalam menggunakan angkutan umum.
- Masih terdapat jalan-jalan rusak yang belum diperbaiki oleh Pemerintah Daerah.
- Terdapat angkutan plat hitam yang perlu ditertibkan bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota.
- Perhitungan Realisasi Kinerja

- 5) Perhitungan realisasi kinerja untuk IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan, yaitu:

$$IKK1.1 = \frac{Jumlah\ RIT\ realisasi\ pada\ tahun\ (n)}{Jumlah\ RIT\ yang\ direncanakan} \times 100\%$$

Tabel II.2 Trayek Ritase Angkutan Keperintisan Jalan

Provinsi	Trayek yang dilayani	Jarak (Km)
BENGKULU	Banjarsari – Kahyapu	32
	Bengkulu – Kerkap – Arga Makmur – Muara Aman	142
	Muara Aman - Curup – Simpang Nangka	81

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Subsidi Operasional Angkutan Jalan, jumlah trayek yang terlayani adalah sebanyak 3 (tiga) trayek, sesuai didalam Surat Keputusan terdapat 3 (tiga) trayek. Untuk pelaksanaan kontrak pada 3 (tiga) trayek dengan masa kontrak mulai 3 Maret 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, memiliki target rit sebanyak 66 rit, sampai dengan akhir Triwulan I realisasi rit adalah sebanyak 66 rit, maka realisasi kinerja dapat dihitung sebagai berikut:

$$Realisasi = \frac{66}{66} \times 100\% = 100\%$$

Jadi, sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2025, realisasi kinerja persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan adalah 100%.

- 6) Perhitungan Capaian Kinerja

IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan, merupakan Indikator kinerja dengan realisasi pencapaian semakin tinggi

menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian kinerja IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan pada Triwulan I terhadap Target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\begin{aligned} &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Jadi, target IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2025 masih belum tercapai. Dan direncanakan akan tercapai pada akhir tahun anggaran 2024.

7) Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Untuk mencapai target IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan, di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 terdapat Kegiatan Subsidi Operasional Angkutan Jalan. Dengan detail sebagai berikut:

Pagu : Rp. 1.953.901.000,-

Realisasi : Rp. 0,-

% Capaian Keuangan : 0%

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa yang akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

- Mengusulkan jaringan trayek perintis baru kepada Direktorat Angkutan Jalan sesuai dengan usulan dari Pemerintah Daerah.
- Meningkatkan pelayanan dari bus perintis pada masing-masing trayek, misalnya menggunakan bus ber AC, dengan jam operasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut.

- Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten/Kota terkait adanya angkutan jalan perintis yang menghubungkan daerah-daerah yang terisolir. Untuk meningkatkan animo masyarakat dalam menggunakan bus perintis tersebut.
- Melakukan monitoring secara rutin ke trayek-trayek bus perintis yang ada di Wilayah kerja BPTD Kelas III Bengkulu

2. IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Realisasi kinerja Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi dihitung berdasarkan Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu. Untuk menghitung Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKK\ 1.3 = \text{Jumlah Terminal Tipe - A dan Terminal Barang yang Beroperasi}$$

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang beroperasi Triwulan I Tahun 2025 sebanyak 2 Lokasi, jika dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja tahun 2024 sebanyak 2 Lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%.

Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.3. Grafik Capaian IKK Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi.



Gambar II. 1 Capaian IKK Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

1) Dasar Hukum

- UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.
- PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

2) Target dan Revisi Target

Didalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi memiliki target kinerja sebanyak 2 lokasi, masih belum terjadi perubahan target kinerja sampai dengan akhir Triwulan I.

3) Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- Dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, Jumlah terminal yang berada di bawah naungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu adalah sebanyak 2 lokasi, hal ini sama dengan jumlah Terminal yang telah diserahkan kepada Kementerian Perhubungan.
- Melakukan upaya-upaya dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pemanfaatan guna upaya peramaian terminal.
- Melakukan rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana terminal, agar masyarakat tertarik untuk menggunakan layanan fasilitas yang ada di Terminal.

4) Faktor Kegagalan dan Potensi Kegagalan

Faktor kegagalan dan potensi kegagalan yang harus diantisipasi dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- Masih terdapat terminal-terminal bayangan yang beroperasi;
- Mulai berkurangnya jumlah pengguna terminal, karena di beberapa lokasi, banyak penumpang yang menunggu bus di luar wilayah terminal.
- Terdapat beberapa perusahaan bus angkutan yang melayani pembelian tiket melalui agen bus diluar area terminal.

5) Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi kinerja untuk IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi, yaitu:

IKK 1.3= Jumlah Terminal Tipe - A dan Terminal Barang yang Beroperasi

Dalam lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, yaitu Daftar Nama, lokasi, Wilayah Kerja dan Satuan Pelayanan Balai Pengelola

Transportasi Darat disebutkan bahwa Satuan Pelayanan Terminal Tipe-A pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu berjumlah 2 (dua) lokasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Terminal Tipe-A

Berdasarkan tabel di atas, Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi adalah sebanyak 2 lokasi, maka realisasi kinerja dapat dihitung sebagai berikut:

Tabel II.3 Tabel Daftar Terminal BPTD Kelas III Bengkulu

No	Nama Satuan Pelayanan Terminal Tipe -A	Kab. / Kota	Status P3D	Beroperasi/ Tidak beroperasi
1	Air Sebakul	Kota Bengkulu	Diserahkan	Beroperasi
2	Simpang Nangka	Kabupaten Rejang Lebong	Diserahkan	Beroperasi

Jadi, sampai dengan akhir Triwulan I tahun 2025, realisasi kinerja Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi adalah 2 lokasi. Tidak terjadi penambahan dan pengurangan jumlah terminal yang beroperasi.

6) Perhitungan Capaian Kinerja

IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi, merupakan Indikator kinerja dengan realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian kinerja Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi pada Triwulan I terhadap Target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$

Jadi, target kinerja Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi sampai dengan akhir Triwulan I tahun 2025 telah tercapai.

7) Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Untuk mencapai target IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 terdapat Kegiatan Terminal Penumpang Tipe-A dikelola, dengan detail anggaran sebagai berikut :

Pagu : Rp. 1.862.132.000,-

Realisasi : Rp. 432.055.082,-

% Capaian Keuangan : 23,20%

.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Melakukan pemanfaatan terminal tipe A Simpang Nangka dan Terminal Tipe A Air Sebakul sesuai peraturan yang berlaku sehingga mendatangkan hasil PNBP;
- Melakukan sosialisasi intens terkait dengan upaya peramaian terminal;
- Perbaikan sistem informasi atau digitalisasi informasi yang dapat mendukung kualitas pelayanan pada terminal dan E-Ticketing.

3. IKK 1.5 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan

a.1 Definisi Indikator Kinerja

Pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan merupakan kegiatan BPTD Kelas III Bengkulu yang saat ini bertugas untuk melakukan

pengawasan operasional harian dan berkala terhadap kapal SDP agar berjalan sesuai aturan dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan tahun 2025 triwulan I sebesar 100% jika dibandingkan dengan target 2024 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100%, dapat disimpulkan sebagai berikut :

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

1) Dasar Hukum

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP.4550/AP.204/DRJD/2019 Tanggal 04 November 2019 Tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2020, terdapat 253 (Dua Ratus Lima Puluh Tiga) lintas penyeberangan perintis di seluruh Indonesia.

2) Target dan Revisi Target

Dari jumlah lintasan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.4550/AP.204/DRJD/2019 sebanyak 253 lintasan diantaranya 1 (satu) lintasan perintis angkutan penyeberangan di Provinsi Bengkulu sebagaimana yang tertuang dalam tabel berikut :

Tabel II. 4 Lintasan Perintis Angkutan Penyeberangan Provinsi Bengkulu Tahun 2024

NO	Provinsi	Nama Lintasan	Jarak (mil)
1	2	3	4
2	Bengkulu	Bengkulu – Enggano	106 mil

pada pelabuhan yang sudah terbangun sehingga dilakukannya revisi III PK tahun 2024 dengan merubah target pada PK tahun berjalan.

3) Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- Adanya bangkitan perjalanan, peningkatan ekonomi, dan peningkatan pembangunan pada daerah yang terlayani;
- Adanya dukungan dan pertanggungjawaban dari Pemerintah Daerah dalam memberikan jaminan keselamatan (safety) dan keamanan (security) terhadap nahkoda dan ABK;
- Adanya jaminan keselamatan dan keamanan kapal selama di Pelabuhan;
- Adanya kepastian ketersediaan penumpang dan barang;
- Kepastian jam operasional keperintisan angkutan penyeberangan.

4) Faktor Kegagalan dan Potensi Kegagalan

Faktor kegagalan dan potensi kegagalan yang harus diantisipasi dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- Keterbatasan kapal/sarana;
- Belum tersedianya layanan yang tetap dan teratur;
- Secara komersial belum menguntungkan;
- Sebagian besar angkutan penyeberangan perintis belum terintegrasi dengan moda transportasi lainnya

5) Perhitungan Realisasi Kinerja

Persentase capaian kinerja pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah trip penyeberangan yang terealisasi dengan target yang telah ditetapkan. Untuk menghitung Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan digunakan rumus sebagai berikut :

$$IKK\ 1.5 = \frac{\text{Jumlah (Trip) realisasi pada bulan (n)}}{\text{Target Setahun (Trip)}} \times 100\%$$

6) Perhitungan Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan penyeberangan:

$$\begin{aligned} & \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\% \\ & = 100/100 \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

7) Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan Tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

Pagu : Rp. 5.626.426.000,-

Realisasi : Rp. 289.761.000,-

% Capaian Keuangan : 5,15%

a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Merencanakan angkutan multimoda untuk menunjang operasional keperintisan angkutan penyeberangan.
- Diperlukannya koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan dan kewenangan tarif lintas penyeberangan, penetapan lintas baru, dan evaluasi lintas eksisting.
- Memenuhi persyaratan teknis laik laut dan SPM kapal penyeberangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. IKK 1. 6 Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi

a.1. Definisi Indikator Kinerja

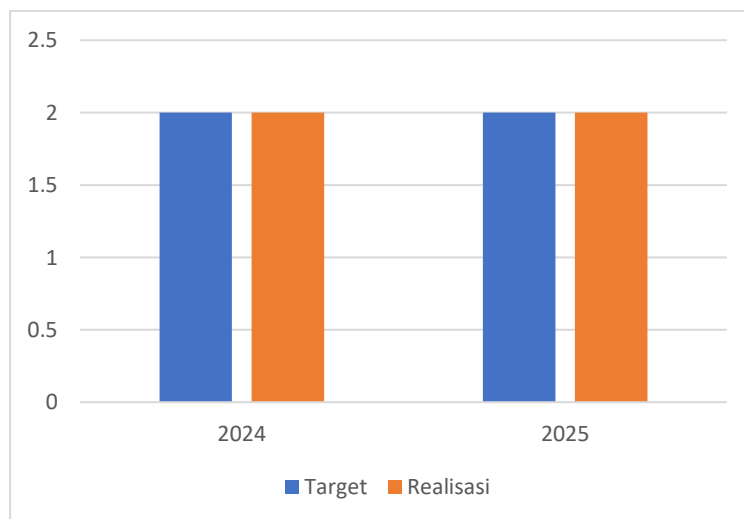
Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan penyeberangan. Pelabuhan penyeberangan adalah Pelabuhan penyeberangan kelas I, kelas II, dan kelas III. Sedangkan, Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan sungai, danau, waduk, dan terusan. Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan pengumpul dan pengumpan. Realisasi kinerja Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi dihitung berdasarkan Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi.

Untuk menghitung realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKK\ 1.6 = \text{Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi}$$

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi Triwulan I Tahun 2025 sebanyak 2 Lokasi, jika dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja tahun 2025 sebanyak 2 Lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik Capaian IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi sebagai berikut :



Gambar II. 2 Grafik Capaian IKK Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi

Berdasarkan grafik diatas, capaian kinerja di Triwulan I Tahun 2025 yaitu 100%. Sampai dengan akhir Triwulan I tidak terjadi penambahan ataupun pengurangan dari realisasi kinerja, sehingga capaian kinerja Triwulan I adalah 100%.

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

1) Dasar Hukum

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2021 tentang Zonasi di Kawasan Pelabuhan yang Digunakan Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
- Peraturan Pemerintah Nomor PP 64 Tahun 2015 tentang Kepelabuhanan,

bahwa Balai Pengelola Transportasi melakukan pengawasan terhadap 2 Pelabuhan SDP yang beroperasi. Banyak faktor penyebab keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan indikator jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi.

- Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP. DRJD 3339 Tahun 2021.

2) Target dan Revisi Target

Didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi memiliki target kinerja pada awal tahun sebanyak 1 lokasi, dimana sampai dengan akhir Triwulan I masih belum ada perubahan pada target Perjanjian Kinerja.

3) Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran TSDP pada Pelabuhan-pelabuhan penyeberangan.
- Melaksanakan rehabilitasi/peningkatan Pelabuhan penyeberangan, agar masyarakat tertarik untuk menggunakan layanan fasilitas yang ada di Pelabuhan.
- Meningkatkan informasi terkait layanan pelabuhan.
-

4) Faktor Kegagalan dan Potensi Kegagalan

Faktor kegagalan dan potensi kegagalan yang harus diantisipasi dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- Pelabuhan yang memerlukan rehabilitasi dan penyesuaian dermaga untuk berlabuhnya kapal serta perbaikan sarana dan prasarana yang rusak disebabkan oleh bencana alam gempa bumi;
- Masih banyak pelabuhan sungai dan danau yang dikelola oleh orang pribadi;
- Masih kurangnya fasilitas-fasilitas di area pelabuhan.

5) Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi kinerja untuk IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi, yaitu:

$$\text{IKK 1.6} = \text{Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi}$$

Dalam lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, yaitu Daftar Nama, lokasi, Wilayah Kerja dan Satuan Pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat disebutkan bahwa Satuan Pelayanan Pelabuhan pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu berjumlah 2 (dua) lokasi sedangkan didalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan TA. 2025 jumlah pelabuhan yang beroperasi ada sebanyak 2 (dua) lokasi , dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II. 5 Tabel Pelabuhan Eksisting

No	Nama Pelabuhan	Lokasi		Penyelenggara	Lintas Yang Dilayani	Ket
		Kab. / Kota	Pulau			
1	Pulau Baai	Kota Bengkulu	Sumatera	PT. ASDP	Bengkulu - Enggano	Satpel
2	Kahyapu	Kabupaten Bengkulu Utara	Pulau Enggano	PT. ASDP	Enggano - Bengkulu	Satpel

Berdasarkan tabel di atas, Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi adalah sebanyak 2 lokasi, maka realisasi kinerja dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Realisasi Kinerja} = 2 \text{ lokasi}$$

Jadi, sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2025, realisasi kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi adalah 2 lokasi.

6) Perhitungan Capaian Kinerja

IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi, merupakan Indikator kinerja dengan realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan

rumus sebagai berikut:

Capaian kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi pada Triwulan I terhadap Target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar: 100%

Jadi, target kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi sampai dengan akhir tahun 2024 sudah tercapai.

7) Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Untuk mencapai target kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi, di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025, terdapat Kegiatan Operasional Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan. Dengan detail sebagai berikut:

Pagu : Rp. 472.286.000,-

Realisasi : Rp. 215.174.696,-

% Capaian Keuangan : 45,56%

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Melakukan perbaikan implementasi di lapangan yaitu Koordinasi dengan para operator pelabuhan agar dapat dilakukan pembenahan terhadap fasilitas-fasilitas di pelabuhan penyeberangan sehingga dalam operasional pelabuhan penyeberangan mampu memberikan dan memenuhi kebutuhan para pengguna jasa transportasi angkutan penyeberangan;
- Melakukan evaluasi mandiri terhadap hasil pelaksanaan kegiatan Pelabuhan SDP yang beroperasi;
- Mendorong adanya Sistem informasi yang dapat dijadikan penunjang dalam pelaksanaan tugas.

II.2.2 SK2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat

Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat, bergantung pada 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu sebagai berikut:

IKK 2.1 : Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A

IKK 2.3 : Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP.

Masing-masing pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

1. IKK 2.1 : Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

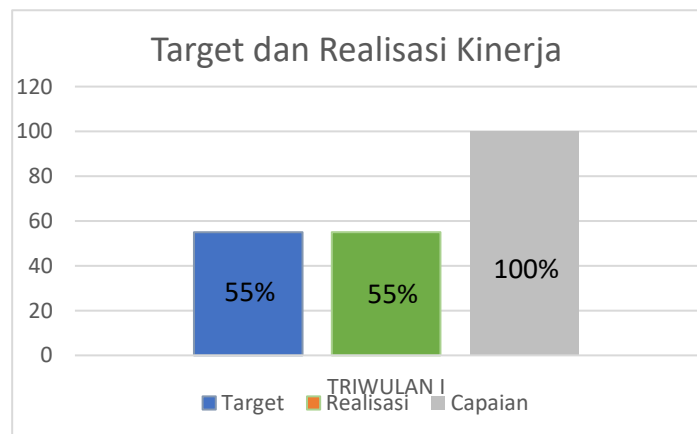
- Berdasarkan PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan, Standar Pelayanan terminal penumpang mencakup pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kehandalan/keteraturan, pelayanan kenyamanan, pelayanan kemudahan/keterjangkauan, pelayanan kesetaraan. Dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.
- Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A dihitung pada Terminal Tipe-A yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- Realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe- A dihitung berdasarkan perbandingan Total Nilai standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A terhadap Jumlah Terminal Tipe-A yang beroperasi.

Untuk menghitung realisasi kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKK2.1 = \frac{SPM \text{ Terminal } (n1) + SPM \text{ Terminal } (n2) + \dots + SPM \text{ Terminal } (n)}{\text{Jumlah Terminal yang dikelola oleh BPTD Kelas III Sulawesi Barat}}$$

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe- A Triwulan I Tahun 2025 sebanyak 55%, jika dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja tahun 2025 sebanyak 55% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik Capaian IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe- A sebagai berikut :



Gambar II. 3 Target dan Realisasi Kinerja SPM TTA

Berdasarkan grafik diatas, Realisasi kinerja di Triwulan I Tahun 2025 yaitu 55%. Sampai dengan akhir Triwulan I tidak terjadi penambahan ataupun pengurangan dari realisasi kinerja, sehingga capaian kinerja Triwulan I adalah 55%.

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

1) Dasar Hukum

- UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
- PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan.

2) Target pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Adapun target IKK 2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan

Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A tahun 2025 diperoleh dari Target Rencana Strategis BPTD Kelas III Bengkulu Tahun 2025-2029 dengan target sebesar 88% yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2025-2029. Sepanjang Triwulan I Tahun 2025 tidak terdapat perubahan perjanjian kinerja yaitu 22%.

3) Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- SOP terlaksana dengan baik berikut dokumen data dukungnya;
- Sarana dan prasarana yang memadai;
- Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas.

4) Faktor Kegagalan dan Potensi Kegagalan

Faktor kegagalan dan potensi kegagalan yang harus diantisipasi dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- Masih kurangnya biaya pemeliharaan bangunan dan gedung terminal;
- Banyak fasilitas utama dan penunjang yang tidak tersedia atau tersedia tetapi kondisinya sudah tidak layak;
- Masih sedikitnya jumlah SDM untuk melakukan kebersihan di lingkungan Terminal.

5) Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi kinerja untuk IKK 2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A, yaitu:

$$IKK2.1 = \frac{SPM \text{ Terminal } (n1) + SPM \text{ Terminal } (n2) + \dots + SPM \text{ Terminal } (n)}{\text{Jumlah Terminal yang dikelola oleh BPTD Kelas III Sulawesi Barat}}$$

Realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A, dapat dihitung sebagai berikut:

$$IKK2.1 = \frac{55 + 55}{2} \times 100\% = 55\%$$

Jadi, sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2025, realisasi kinerja persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A adalah 22%.

6) Perhitungan Capaian Kinerja

IKK 2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A, merupakan Indikator kinerja dengan realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian IKK2.1} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$
$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{55}{55} \times 100\% = 100\%$$

Capaian kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A pada Triwulan I terhadap Target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar: 100%.

Jadi, target kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A sampai dengan akhir Triwulan I tercapai.

7) Perhitungan dan Realisasi Kinerja

Untuk mencapai target IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A, di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025, terdapat kegiatan Operasional Terminal Penumpang Tipe-A, Terminal Penumpang Tipe-A ditingkatkan dan Terminal Penumpang Tipe-A ditingkatkan (Prioritas Nasional). Dengan detail sebagai berikut:

Pagu : Rp. 0

Realisasi : Rp. 0

% Capaian Keuangan : 0%

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Meningkatkan kualitas terhadap fasilitas yang telah tersedia yang merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal Tipe A;
- Melengkapi fasilitas yang belum tersedia yang merupakan bagian dari

Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal Tipe-A;

- Mengoptimalkan implementasi SOP yang ada dan meningkatkan kualitas SDM di Terminal Tipe-A.

2. IKK 2.3 : Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP

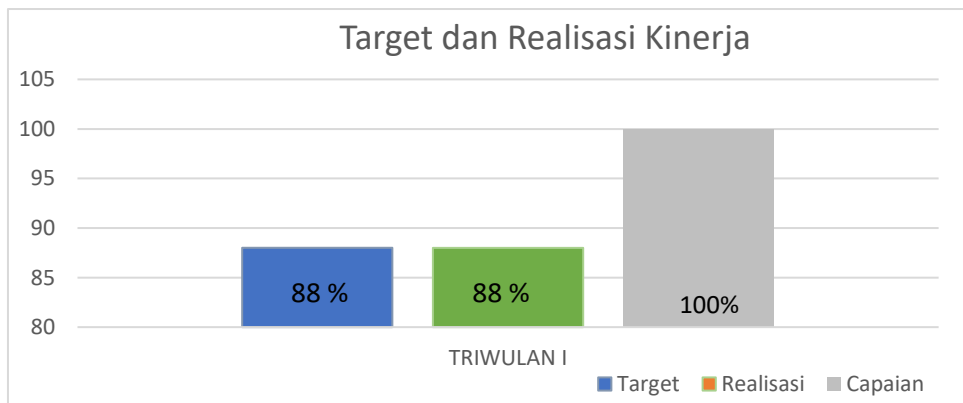
a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP saat ini diukur hanya pada 7 (tujuh) lintas utama penyeberangan atau 14 (empat belas) Pelabuhan Penyeberangan yang melayani, diantaranya: Pelabuhan Penyeberangan Merak, Pelabuhan Penyeberangan Bakahueni, Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, Pelabuhan Penyeberangan Padangbai, Pelabuhan Penyeberangan Lembar, Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api Api, Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Kelian, Pelabuhan Penyeberangan Kayangan, Pelabuhan Penyeberangan Pototano, Pelabuhan Penyeberangan Bajoe, Pelabuhan Penyeberangan Kolaka, Pelabuhan Penyeberangan Kariangau, Pelabuhan Penyeberangan Penajam. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelabuhan Penyeberangan diatur melalui PM 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelabuhan Penyeberangan. Selanjutnya diperluas tidak hanya 7 (tujuh) lintas utama penyeberangan, melainkan pelabuhan penyeberangan yang dikelola oleh Ditjen Perhubungan Darat dengan cara melibatkan BPTD dalam pemantauan SPM.

$$IKK2.2 = \frac{\text{Jumlah Pelabuhan yang memenuhi SPM}}{\text{Jumlah Pelabuhan yang Dipantau}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Realisasi Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Triwulan I Tahun 2025 sebesar 88% jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 88%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Realisasi IKK Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum di Pelabuhan SDP sebagai berikut :



Gambar II. 4 Target dan Realisasi Kinerja SPM Pelabuhan SDP

Berdasarkan grafik diatas, capaian kinerja di Triwulan I Tahun 2025 yaitu 100%. Sampai dengan akhir Triwulan I tidak terdapat perubahan target perjanjian kinerja 100% dari realisasi kinerja.

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

1) Dasar Hukum

- PM 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
- PM 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Penyeberangan;
- PM 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelabuhan.

2) Target pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Adapun target IKK 2.2 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP tahun 2025 diperoleh dari Target Rencana Strategis BPTD Kelas III Bengkulu Tahun 2025-2029 dengan target sebesar 88% yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2025-2029. Sepanjang Triwulan I Tahun 2025 tidak terdapat perubahan terhadap target Perjanjian Kinerja.

3) Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- Tersedianya Sumber Daya Manusia yang memiliki Kualifikasi terkait Pemeriksaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP;

- Terjadinya Sistem Digitalisasi terhadap pengisian Formulir Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP sehingga mempermudah dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP;
- Tersedianya Sumber Daya Manusia untuk melakukan Pemeriksaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP.

4) Faktor Kegagalan dan Potensi Kegagalan

Faktor kegagalan dan potensi kegagalan yang harus diantisipasi dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- Masih kurangnya Sumber Daya Manusia untuk melakukan Pemeriksaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP;
- Tidak adanya Sistem Digitalisasi terhadap pengisian Formulir Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP;
- Tidak adanya Sumber Daya Manusia yang memiliki kualifikasi terkait pemeriksaan Standar Pelayanan Minimum di Pelabuhan SDP.

5) Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi kinerja untuk IKK 2.2 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP, yaitu:

$$IKK2.2 = \frac{\text{Jumlah Pelabuhan yang memnuhi SPM}}{\text{Jumlah Pelabuhan yang Dipantau}} \times 100\%$$

$$= \frac{176}{2} \times 100\% = 88\%$$

Jadi, sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2025, realisasi kinerja persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP adalah 88%.

6) Perhitungan Capaian Kinerja

IKK 2.2 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP, merupakan Indikator kinerja dengan realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan

pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{88}{88} \times 100\% = 100\%$$

Capaian kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP pada Triwulan I terhadap Target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar: 100%.

Jadi, target kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP sampai dengan akhir Triwulan I tercapai.

7) Perhitungan dan Realisasi Kinerja

Untuk mencapai target IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP, di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025, terdapat kegiatan Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan dikelola, engan detail sebagai berikut:

Pagu : Rp 0,-

Realisasi : Rp 0,-

% Capaian Keuangan : 0%

a.4.Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Meningkatkan kualitas terhadap fasilitas yang telah tersedia yang merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP;
- Melengkapi fasilitas yang belum tersedia yang merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP;
- Mengoptimalkan implementasi SOP yang ada di pelabuhan SDP.

II.2.3 SK 3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

1. IKK 3.1 Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

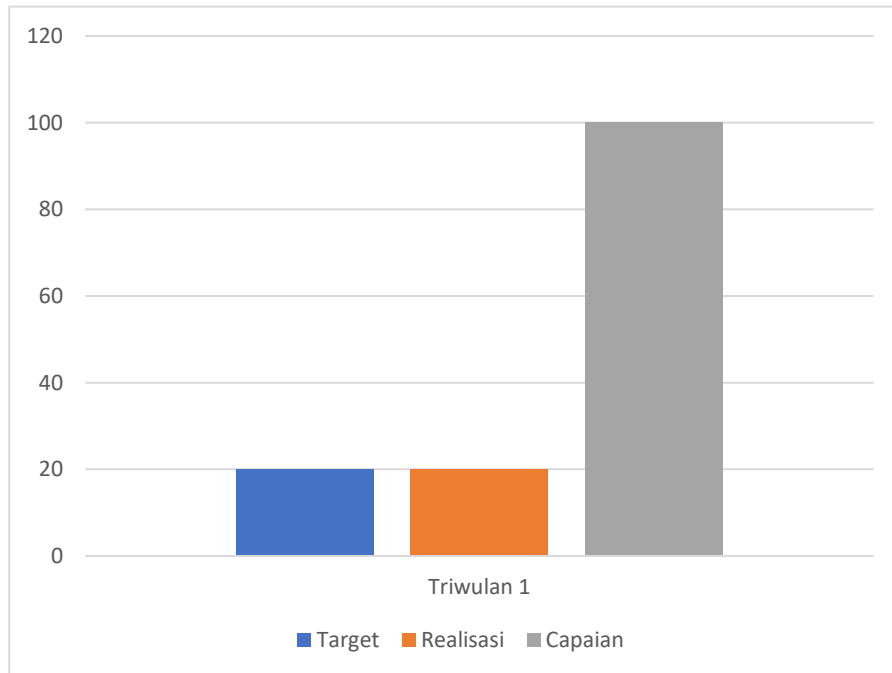
Kebutuhan Perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pemenuhan kebutuhan Perlengkapan Jalan merupakan perhitungan dari 9 (Sembilan) item Perlengkapan Jalan dengan satuan yang berbeda. Adapun 9 (Sembilan) item dimaksud meliputi :

- 1) Marka Jalan;
- 2) Rambu Lalu Lintas;
- 3) Patok Lalu Lintas;
- 4) Paku Jalan;
- 5) Pagar Pengaman Jalan;
- 6) Alat Penerangan Jalan;
- 7) Lampu Peringatan Pemakai Jalan;
- 8) Alat Pemberi Isyarat lalu Lintas;
- 9) Cermin Tikungan.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal berupa Kegiatan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan di Provinsi Bengkulu Tahun 2025 dilaksanakan pada beberapa Ruas Jalan Nasional. Pada Triwulan I ini dapat dilaporkan bahwa realisasi kinerja perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal di Provinsi Bengkulu telah mencapai angka 5% dari target 20%. Berikut grafik atas realisasi Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal sebagai berikut:

$$IKK3.1 = \frac{\text{Jumlah Perlengkapan Jalan yang telah terpasang}}{\text{Jumlah kebutuhan perlengkapan jalan}} \times 100\%$$



Gambar II. 5 Target dan Realisasi Kinerja Persentase Perlengkapan Jalan

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

1) Dasar Hukum

- UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- PM Perhubungan No. 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
- Renstra BPTD Kelas III Bengkulu Tahun 2025 – 2029;
- PM 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan.

2) Target pada Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2024

Adapun target IKK Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal tahun 2025 diperoleh dari Target Rencana Strategis BPTD Kelas III Bengkulu 2025-2029 dengan target Triwulan I sebesar 5%

3) Faktor Keberhasilan

- Adanya perencanaan yang matang;
- Pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu;
- Optimalnya pengawasan pembangunan.

4) Faktor Kegagalan

- Pelaksanaan pembangunan tidak tepat waktu;
- Kurang optimalnya pelaksanaan pengawasan pembangunan.

5) Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Triwulan I Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut:

IKK 3.1

$$= \frac{\text{Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang}}{\text{Jumlah kebutuhan perlengkapan jalan}} \times 100\%$$

$$IKK\ 3.1 = \frac{20}{20} \times 100\%$$

$$IKK\ 3.1 = 100\%$$

6) Perhitungan Capaian Kinerja

Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Triwulan I Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{20}{20} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = 100\%$$

7) Perhitungan Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Triwulan I Tahun 2025 yaitu Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal memiliki target keuangan Triwulan I sebagai berikut :

Pagu : Rp 7.026.550.000,-

Realisasi : Rp 6.165.382.350,-

% Capaian Keuangan : 87,5%

a.4.Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa yang Akan Datang

Upaya untuk meningkatkan kinerja capaian Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal BPTD Kelas III Bengkulu akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi bersama pihak penyedia untuk selalu menjaga kualitas dan berupaya menyesuaikan target pekerjaan;
- Melakukan review berkala untuk beberapa periode untuk koreksi sepanjang progres kerja berjalan;
- Menyampaikan laporan progress secara berkala serta dengan melakukan monitoring ke lapangan untuk dapat segera mengantisipasi apabila terjadi hal-hal yang kiranya dapat menghambat keberhasilan pekerjaan..

2. IKK 3.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

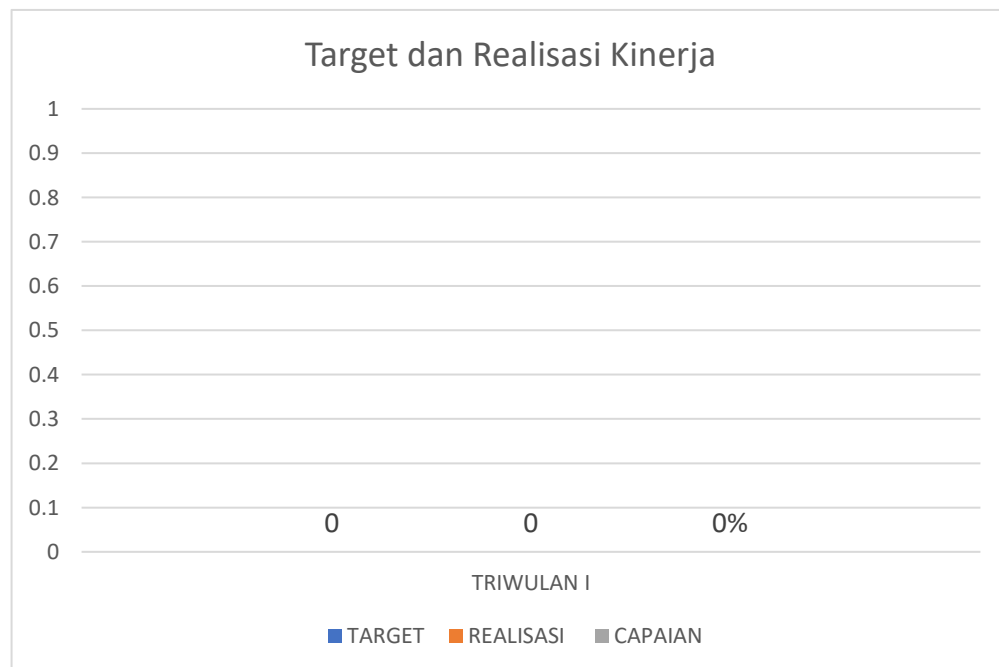
a.1. Definisi Indikator Kinerja

Sosialisasi keselamatan transportasi jalan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam bertransportasi. Pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan Kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan yang dilaksanakan sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini. Realisasi kinerja Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan dihitung berdasarkan jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan. Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan melalui kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan yang diselenggarakan di Direktorat Sarana Transportasi Jalan dan BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat). Untuk menghitung realisasi kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKK\ 3.5 = \frac{\text{Jumlah kumulatif masyarakat yang mendapatkan sosialisasi pada PNKJ}}{\text{Jumlah kumulatif masyarakat yang mendapatkan sosialisasi pada PNKJ}}$$

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Realisasi jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 0 jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 0 maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan. Pencapaian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar II. 6 Capaian IKK Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

1). Dasar Hukum :

- UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- PM Perhubungan No. 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;

Adapun target IKK Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang Keselamatan Transportasi Jalan Tahun 2025 diperoleh dari Target Rencana

Strategis BPTD Kelas III Bengkulu 2025-2029 dengan target sebesar 2000 Orang yang merupakan asumsi proyeksi arahan pimpinan pada rapat Renstra 2025-2029.

2). Faktor Keberhasilan :

- Pelaksanaan sosialisasi keselamatan kepada masyarakat secara kontinyu dan terus menerus;
- Adanya koordinasi dan komitmen antara instansi pemerintah terkait dengan masyarakat terkait keselamatan lalu lintas;
- Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

3). Faktor Kegagalan :

- Tidak Terselenggaranya sosialisasi keselamatan;
- Tidak adanya koordinasi dan komitmen antara pemerintah instansi terkait dan masyarakat terkait keselamatan lalu lintas;
- Kurangnya SDM dibidangnya.

4). Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan Triwulan I Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} IKK \ 3.5 &= \text{Jumlah kumulatif masyarakat yang tersosialisasi tentang} \\ &\text{keselamatan transportasi jalan} \\ &= 0 \text{ Orang} \end{aligned}$$

5). Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan Triwulan I Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

Capaian = Realisasi Target

= 0%

6). Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan yang melekat pada anggaran kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional) yang memiliki target keuangan Triwulan I sebagai berikut :

Pagu : Rp 0,-

Realisasi : Rp 0,-

% Capaian Keuangan : 0%

3. IKK.7a Presentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor adalah pemberian akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) sesuai dengan perdirjen Nomor KP.4404/AJ.502/DRJD/2020. Presentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor merupakan presentase jumlah kumulatif unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor (UPUBKB) yang telah terakreditasi baik milik pemerintah daerah maupun swasta sampai dengan tahun ke-n dibandingkan dengan jumlah pemerintah daerah Indonesia dan jumlah unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor (UPUBKB) milik swasta. .

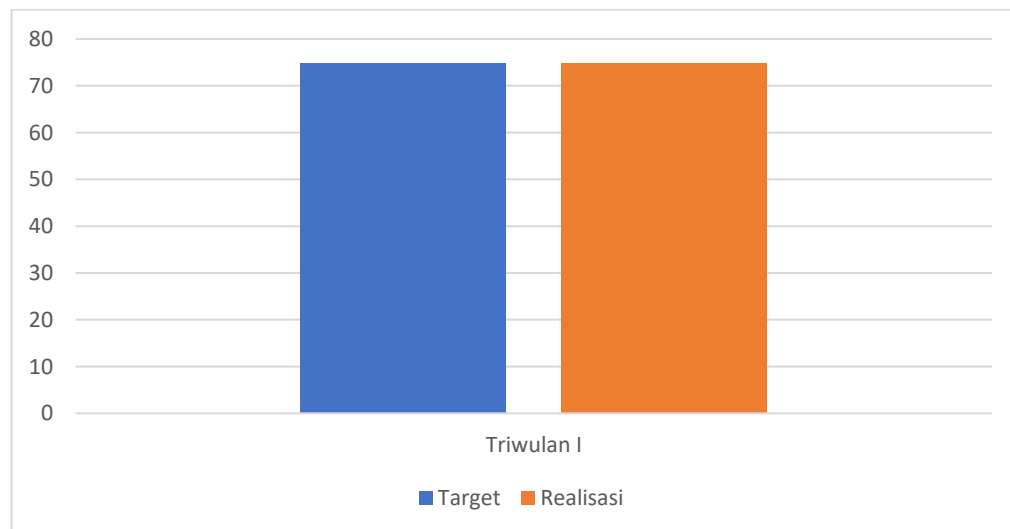
a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor adalah pemberian akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.4404/AJ.502/DRJD/2020. Capaian kinerja Presentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dilaksanakan dengan melalui berbagai kegiatan diantaranya yaitu:

- Monitoring Evaluasi dan Akreditasi UPPKB;
- Monitoring Evaluasi dan Sosialisasi Prasarana Transportasi Jalan;
- Pengawasan Pembinaan dan Pemeriksaan Rancang Bangun di Perusahaan Karoseri;
- Kalibrasi Peralatan PKB 5) Pengadaan Alat Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Presentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2025 sebesar 74,8% jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 74,8% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II. 8** Grafik Capaian IKK Presentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.



Gambar II. 7 Grafik Capaian IKK Presentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

1) Dasar Hukum :

Dasar hukum Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK. 5370/KP.108/DRJD/20217 tentang Kompetensi petugas unit pelaksana Penimbangan Kendaraan Kendaraan Bermotor.

2) Faktor Keberhasilan

- Terpenuhi Sarana dan Prasarana UPPKB sesuai ketentuan atau undang-undang yang berlaku;
- Terpenuhi Fasilitas Pendukung Pelayanan UPPKB;
- Terpenuhi Sumber Daya Manusia yang Cakap, Handal dan Sinergitas.

3) Faktor Kegagalan

- Tidak Layak Sarana dan Prasarana Terminal sehingga pelayanan dalam pengujian kurang maksimal;

- Minimnya Fasilitas Pendukung di di UPPKB;
- Kurangnya Jumlah Sumber Daya Manusia Cakap, Handal, dan Sinergitas.

4) Perhitungan Realisasi Kinerja

$$\frac{\text{Presentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor}}{\text{Target Presentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor}} \times 100\%$$

5) Perhitungan Capaian Kinerja

$$\% \text{ Capaian} = \frac{74,8}{100} \times 100\% = 100\%$$

6) Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait capain Indikator Kinerja Jumlah Presentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2024 sebagai berikut :

Pagu : Rp 2.552.865.000,-

Realisasi : Rp 1.432.564.940,-

% Capaian Keuangan : 56,11%

a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya, antara lain:

- Mengadakan bimbingan teknis dan peningkatan kompetensi SDM terhadap petugas penguji berkala kendaraan bermotor;
- Monitoring dan evaluasi yang rutin terhadap pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- Rutin melakukan kalibrasi alat pengujian berkala kendaraan bermotor.

II.4 SK 5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat,

mengacu pada kegiatan tupoksi Perhubungan Darat yang dilaksanakan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu menggunakan 1 (satu) IKK, yaitu: IKK 5.1 : Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat masing-masing pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel II. 6 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN I		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat					
IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	81	81	81	100%

1. IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat.

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri dari:

- Aspek Perencanaan;
- Aspek Kepegawaian (SDM Aparatur);
- Aspek Keuangan;
- Aspek Penyelenggaraan Perkantoran (umum).

Aspek perencanaan dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang terdiri dari: Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), pengimputan aplikasi e-performance.

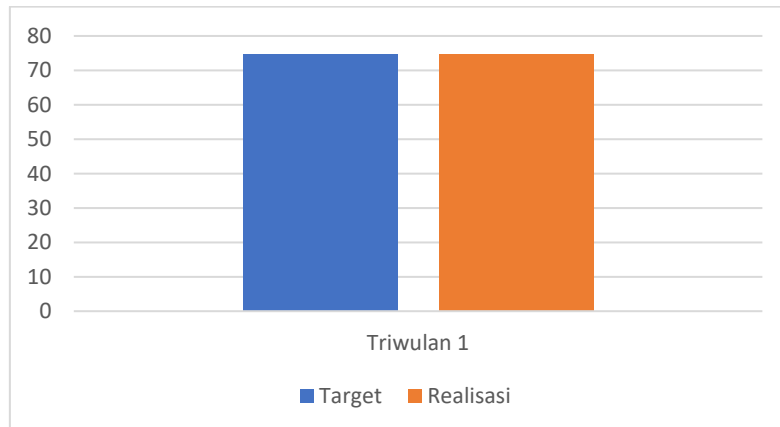
Aspek kepegawaian dinilai melalui indeks profesionalisme ASN yang terdiri dari sub aspek kualifikasi (Pendidikan formal terakhir), kompetensi, kinerja, dan disiplin.

Aspek keuangan dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja. Sedangkan, aspek penyelenggaraan perkantoran dinilai berdasarkan hasil survei indeks kepuasan pegawai satuan kerja terhadap

penyelenggaraan perkantoran.

a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Capaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Tahun 2025 sebesar 81% jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 81% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan dalam grafik sebagai berikut



Gambar II. 8 Capaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat

a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

1) Dasar Hukum

- Peraturan Menteri PANRB No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Sarana & Prasarana Kantor;
- PM Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PM 03 2014 Pedoman Susun RKA Kemenhub;
- Rencana Startegi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu Tahun 2020 - 2024;

2) Target dan Revisi Target

Didalam Perjanjian kinerja Tahun 2025, IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat memiliki target kinerja sebesar 25%. Sampai dengan akhir Triwulan I tidak terjadi perubahan target.

3) Faktor – Faktor Keberhasilan :

- Kualitas pelaporan dan perencanaan yang baik serta pemenuhan dokumen;
- Ketepatan Penyusunan Laporan;

- SDM yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan.
- 4) Faktor- Faktor Kegagalan :
- Tidak adanya dukungan teknis dari setiap kegiatan yang dilaksanakan sehingga proses pelaksanaan dapat berjalan dengan maksimal;
 - Sarana dan prasarana kantor yang tidak memadai dan perlunya pemenuhan;
 - SDM yang kurang memadai sesuai background maupun kualifikasi dibidangnya.
- 5) Perhitungan Realisasi Kinerja
- Perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Triwulan I Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

$$\frac{\text{Persentase Tingkat Penyelenggaraan} \\ \text{Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat}}{\text{Target Persentase Tingkat Penyelenggaraan} \\ \text{Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat}} \times 100\%$$

Jadi, pada akhir Triwulan I Tahun 2025, realisasi kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat adalah 100%.

- 6) Perhitungan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Triwulan I Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{81}{81} \times 100\%$$

$$= 100 \%$$

- 7) Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Triwulan I Tahun 2025 yang memiliki target keuangan Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut :

Pagu : Rp 4.314.638.000,-

Realisasi : Rp 577.702.813,-

% Capaian Keuangan : 13,39%

II.5 SK 6 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat, mengacu pada kegiatan tupoksi Perhubungan Darat yang dilaksanakan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu menggunakan 1 (satu) IKK, yaitu: IKK 6.1 : Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel II. 7 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN I		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat					
IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	84	84	84	100%

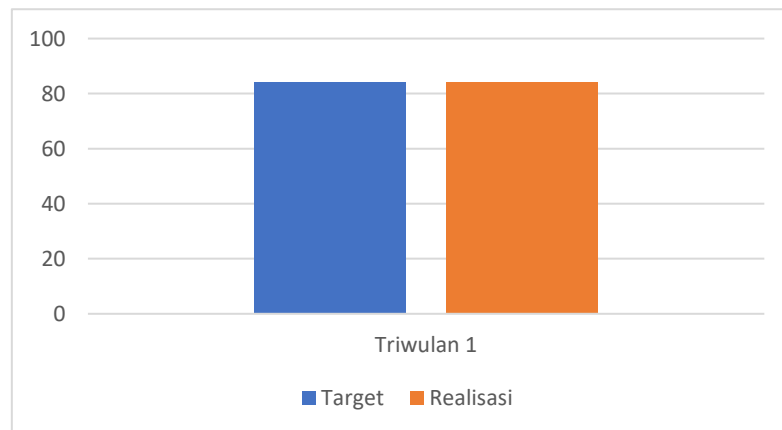
1. IKK 6.1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

a.1. Definisi Indikator Kinerja

PP nomor 16 tahun 2021 tentang pembangunan yang meliputi perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi. Capaian kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat dilaksanakan dengan melalui berbagai kegiatan diantaranya yaitu: 1) Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2) Peningkatan Motivasi Pegawai BPTD Bengkulu 3) Inhouse Consultant 4) Rakornis.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Capaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Tahun 2025 sebesar 84% jika dibandingkan dengan target PK 2025 sebesar 84% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan dalam grafik sebagai berikut :



Gambar II. 9 Capaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

1) Dasar Hukum

PP nomor 16 tahun 2021 tentang pembangunan yang meliputi perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi dan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Target dan Revisi Target. Didalam Perjanjian kinerja Tahun 2025, IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat memiliki target kinerja sebesar 84%. Sampai dengan akhir Triwulan I tidak terjadi perubahan target.

2) Faktor – Faktor Keberhasilan :

- Tersedianya sarana dan Prasarana kantor yang memadai sesuai dengan kebutuhan;
- Tercapainya Reformasi birokrasi dalam pelayanan perkantoran;
- Adanya Sumber Daya Manusia yang berkompeten.

3) Faktor- Faktor Kegagalan :

- Tidak tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
- Kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkompeten;
- Tidak tercapainya realisasi anggaran sesuai target.

4) Perhitungan Realisasi Kinerja

Untuk menghitung Indikator Kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Persentase Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat}}{\text{Target Persentase Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat}} \times 100\%$$

5) Perhitungan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Triwulan I Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{84}{84} \times 100\%$$

$$= 100 \%$$

6) Pagu, Realisasi dan Capaian Keuangan

Adapun anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Triwulan I Tahun 2025 yang memiliki target keuangan Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut :

Pagu : Rp 21.792.420.000,-

Realisasi : Rp 5.422.351.569,-

% Capaian Keuangan : 25%



BAB III

PENUTUP

BAB III

PENUTUP

III.1 Ringkasan Capaian

Dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu, Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK) Triwulan I ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Sebagai penutup dari Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dapat disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Sebagai pelaksanaan kegiatan untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu dengan segala keterbatasan yang ada dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan Tahun 2025 ini terdapat 11 (Sebelas) Indikator Kinerja yang capaiannya sesuai dari target yang telah ditentukan;
2. Untuk meningkatkan capaian kinerja di triwulan berikutnya, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu akan melakukan proses yang lebih selektif terhadap pengusulan target renstra dengan menerapkan skala prioritas untuk peningkatan pembangunan sarana dan prasarana dengan pertimbangan ketersediaan anggaran;
3. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu juga akan meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait.
4. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 ini mencakup pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025 – 2029 dengan total jumlah indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 11 Indikator dari 5 Sasaran. Hal ini mendukung terlaksananya kegiatan dengan baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025 – 2029.
 - Persentase pelaksanaan keberintisan angkutan jalan terealisasi sebesar 0% (target 100%) tercapai 0%;

- Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal barang yang beroperasi terealisasi sebesar 2 Lokasi (target 2 lokasi) tercapai 100%;
- Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan terealisasi sebesar 25% (target 100%) tercapai 25%;
- Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi terealisasi sebesar 2 Lokasi (target 2 Lokasi) tercapai 100%;
- Persentase pelaksanaan standar pelayanan minimum (SPM) di Terminal Tipe A terealisasi sebesar 13,75 (target 55%) tercapai 25%;
- Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP terealisasi sebesar 22 (target 88%) tercapai 25%;
- Persentase perlengkapan jalan yang terpasang terealisasi sebesar 5 (target 20%) tercapai 25%;
- Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan terealisasi sebesar 0 orang (target 2000) tercapai 0%;
- Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor terealisasi sebesar 18,7 (target 74,8%) tercapai 25%;
- Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terealisasi sebesar 81 (Target 81) tercapai 100%;
- Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebesar 84 (target 84) tercapai 100%.

III.2. Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Adapun hasil evaluasi, rekomendasi dan unit kerja penanggung jawab dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET	Tahun 2024			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
SK1 Meningkatkan Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Tranpsortasi						72,29%			
IKK 1.1	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	%	100	25	0	0%	BELUM TERCAPAI (KARENA ADANYA EFISIENSI)	Menyediakan atau memberikan subsidi untuk pelayanan angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah - daerah tersebut	Tim LLJSDP dan Tim Sarana
IKK 1.3	Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi	Lokasi	2	2	2	100%	TERCAPAI	1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staff Teminal Tipe A 2. Melakuka Evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM 3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional Terminal Tipe A	Wasatpel
IKK 1.5	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	%	100	25	25	100%	TERCAPAI	Menyediakan atau memberikan subsidi untuk pelayanan angkutan penyeberangan perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah - daerah tersebut	
IKK 1.6	Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi	Lokasi	2	2	2	100%	TERCAPAI	1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staff pelabuhan penyeberangan	Wasatpel

								2. Melakukan Evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM 3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional pelabuhan penyeberangan	
SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat					0%			
IKK 2.1	Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A	%	55	13,75	13,75	100%	TERCAPAI	1. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan standar operasional pelabuhan SDP 2. Memberikan reward dan punishment terkait pelaksanaan standar pelayanan minimum	Wasatpel
IKK 2.3	Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	%	88	22	22	100%	TERCAPAI	1. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan standar operasional pelabuhan SDP 2. Memberikan reward dan punishment terkait pelaksanaan standar pelayanan minimum	Wasatpel
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat					55,6%			
IKK 3.1	Presentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	20	90	35	38,89%	TERCAPAI	1. Menginventarisasi kebutuhan infrastruktur keselamatan jalan 2. Membangun dan memfasilitasi infrastruktur keselamatan jalan 3. Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah atau instansi lain terkait perlengkapan jalan	Pokja LLJSDP
IKK 3.5	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	2000	2000	0	0%	BELUM TERCAPAI	1. Melakukan sosialisasi kepada perusahaan angkutan jalan terkait standar pelayanan minimal angkutan jalan. 2. Melaksanakan kegiatan pekan keselamatan jalan dengan tujuan memberikan edukasi tentang keselamatan transportasi kepada masyarakat 3. Memberikan apresiasi kepada perusahaan angkutan jalan yang telah memberikan pelayanan angkutan terbaik kepada masyarakat melalui kegiatan pemilihan PO terbaik.	Pokja Sarana

IKK 7a	Presentase Standarisasi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	%	74,8	80	80	100%	TERCAPAI	1. Mengusulkan SDM penguji yang berkompeten tiap tahunnya sesuai kebutuhan 2. Melaksanakan perawatan alat kalibrasi 3. Melakukan sosialisasi tentang teknis pengujian kendaraan bermotor	Wasatpel
SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat						0%			
IKK 5.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	81	80	0	0%	BELUM TERCAPAI	1. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai terhadap tupoksi penyelenggaraan transportasi darat 2. Melaksanakan bimbingan teknis penyelenggaraan transportasi darat kepada seluruh pegawai	Pokja Tata Usaha
SK6 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel						100%			
IKK 6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	84	84	84	100%	TERCAPAI	1. Melakukan sosialisai terkait pelayanan perkantoran, administrasi dan surat menyurat 2. Mengusulkan SDM yang sesuai dengan kompetensi penyelenggaraan perkantora 3. Memberikan penghargaan kepada seksi atau subbag yang administrasi penyelenggaraan perkantorannya baik dan rapih	Pokja Tata Usaha
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran Program						100%			
Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Program						100%			
Jumlah Indikator Kinerja Program yang lebih besar atau sama dengan 100% (IKP≥100%)						4			
Jumlah Indikator Kinerja Program kurang dari 100% (0%≤IKP<100%)						6			



• LAMPIRAN

LAMPIRAN



LAMPIRAN LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA
TRIWULAN I BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III BENGKULU